



PERAN BENDAHARA PENGELUARAN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEUANGAN PADA INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG

THE ROLE OF THE EXPENDITURE TREASURER IN ENSURING FINANCIAL ADMINISTRATIVE ORDER AT THE MAGELANG CITY REGIONAL INSPECTORATE

Fariska Sari^{1*}, Herlina Manurung²

^{1*}Universitas Tidar, Email : Fariskasari012@gmail.com

²Universitas Tidar, Email : herlina.manurung@untidar.ac.id

*email koresponden: Fariskasari012@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the role of the expenditure treasurer in supporting orderly financial administration at the Regional Inspectorate of Magelang City. Orderly financial administration is an important aspect of regional financial management aimed at ensuring transparency and accountability in the use of public funds. The expenditure treasurer has a strategic role in the financial administration process, starting from submitting payment requests, verifying supporting documents, and preparing accountability reports. This research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The data sources consisted of primary data obtained through interviews with the expenditure treasurer and related staff, as well as secondary data obtained from financial administration documents at the Regional Inspectorate of Magelang City. The results indicate that the expenditure treasurer plays an important role in supporting orderly financial administration through managing petty cash funds, recording financial transactions, and preparing accountability reports (SPJ). In addition, the treasurer ensures that every transaction is supported by complete and valid documentation in accordance with applicable regulations. However, in its implementation there are still obstacles, namely the financial application system occasionally undergoes maintenance, which temporarily disrupts the data input process and the preparation of financial administration reports.

Keywords: *Expenditure Treasurer, Financial Administration, Regional Financial Management, Accountability.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran bendahara pengeluaran dalam mendukung tertib administrasi keuangan pada Inspektorat Daerah Kota Magelang. Tertib administrasi keuangan merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Bendahara pengeluaran memiliki peran strategis dalam proses penatausahaan keuangan, mulai dari pengajuan pembayaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan bendahara pengeluaran dan staf terkait, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen administrasi keuangan pada Inspektorat Daerah Kota Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bendahara pengeluaran memiliki peran penting dalam mendukung tertib administrasi keuangan melalui pengelolaan uang persediaan, pencatatan transaksi keuangan, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban (SPJ). Selain itu, bendahara pengeluaran juga memastikan setiap transaksi didukung oleh dokumen yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, yaitu sistem aplikasi keuangan yang terkadang mengalami



maintenance sehingga proses penginputan data dan penyusunan laporan administrasi keuangan menjadi terhambat.

Kata kunci: Bendahara Pengeluaran, Administrasi Keuangan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas.

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Keuangan daerah tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran, tetapi juga menyangkut tanggung jawab dalam pengelolaan, pencatatan, serta pelaporan yang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, bendahara pengeluaran memiliki peran yang sangat strategis. Bendahara pengeluaran bertanggung jawab dalam menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, serta mempertanggungjawabkan uang persediaan untuk kebutuhan belanja kegiatan. Ketelitian dalam proses verifikasi dokumen, pencatatan transaksi, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban menjadi faktor penting dalam menjaga tertib administrasi keuangan.

Tertib administrasi keuangan merupakan salah satu indikator terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Administrasi yang tertib ditunjukkan melalui kelengkapan dokumen, ketepatan pencatatan, kepatuhan terhadap regulasi, serta ketepatan waktu dalam penyampaian laporan. Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada publik.

Namun dalam praktiknya, pengelolaan administrasi keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti keterlambatan penyusunan laporan pertanggungjawaban, ketidaksesuaian pencatatan transaksi, serta kurangnya kelengkapan dokumen pendukung. Permasalahan tersebut dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan serta berpotensi menimbulkan temuan dalam proses pemeriksaan. Oleh karena itu, peran bendahara pengeluaran menjadi sangat penting dalam memastikan setiap proses administrasi keuangan berjalan secara tertib, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran juga tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan waktu, dinamika kegiatan, serta perubahan regulasi yang harus segera disesuaikan. Kondisi tersebut menuntut bendahara pengeluaran untuk memiliki ketelitian dan pemahaman yang baik dalam pengelolaan administrasi keuangan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana peran bendahara pengeluaran dalam mendukung terciptanya tertib administrasi keuangan.



a. Penelitian Terdahulu

Judul	Tahun	Penulis	Metode Penelitian	Lokasi Penelitian	Hasil
Peran dan Tanggung Jawab Bendahara Pengeluaran dalam Pengelolaan Keuangan	2025	Saputro dkk.	Kualitatif	Pemerintah Daerah	Bendahara pengeluaran berperan penting dalam pencairan anggaran, pencatatan transaksi, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Terdapat kendala pada pemahaman regulasi dan kapasitas SDM.
Peran Bendahara Pengeluaran pada Pengelolaan Keuangan	2022	Simbolon	Deskriptif	Pemerintah Daerah	Penatausahaan dan pengendalian keuangan telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengaruh Peran Bendahara Pengeluaran terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2016	Susilawati	Kuantitatif	Pemerintah Daerah	Peran bendahara pengeluaran berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa bendahara pengeluaran memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam proses penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Namun sebagian besar penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek pengaruh peran bendahara terhadap kualitas laporan keuangan atau pengelolaan anggaran secara umum.

Sementara itu, penelitian yang secara khusus membahas peran bendahara pengeluaran dalam mendukung tertib administrasi keuangan pada instansi pengawasan daerah, khususnya pada Inspektorat Daerah Kota Magelang, masih terbatas. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana peran bendahara pengeluaran dalam mendukung tertib administrasi keuangan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

2. METODE PENELITIAN

Program Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2018:213) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekan pada makna.

Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kota Magelang sebagai tempat pelaksanaan kegiatan magang. Waktu penelitian dilakukan selama kegiatan magang berlangsung, yaitu 5 Januari – 15 Maret tahun 2026. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai peran bendahara pengeluaran dalam



mendukung tertib administrasi keuangan pada instansi tersebut.

Informan dalam penelitian ini adalah bendahara di Inspektorat Daerah Kota Magelang. Informan dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan pengelolaan dan pencatatan administrasi keuangan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan bendahara yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi keuangan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen administrasi, seperti laporan pertanggungjawaban (SPJ), bukti transaksi, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di Inspektorat Daerah Kota Magelang.

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian. Menurut Sugiyono, observasi merupakan proses pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses administrasi keuangan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran di Inspektorat Daerah Kota Magelang.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab antara peneliti dengan informan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam. Menurut Lexy J. Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan bendahara pengeluaran serta staf yang terlibat dalam pengelolaan keuangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, arsip, maupun dokumen lainnya. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen administrasi keuangan seperti laporan pertanggungjawaban (SPJ), bukti transaksi, serta dokumen pendukung lainnya.

b. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, yaitu meliputi tiga tahapan yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, serta pemfokusan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh menjadi lebih terarah dan relevan dengan penelitian.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif sehingga memudahkan peneliti dalam memahami informasi yang diperoleh mengenai peran bendahara



pengeluaran dalam administrasi keuangan.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap Terakhir adalah menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis sehingga dapat memberikan gambaran mengenai peran bendahara pengeluaran dalam mewujudkan tertib administrasi keuangan di Inspektorat Daerah Kota Magelang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Peran Bendahara Pengeluaran dalam Mendukung Tertib Administrasi Keuangan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di Inspektorat Daerah Kota Magelang, bendahara pengeluaran memiliki peran penting dalam mendukung tertib administrasi keuangan. Peran tersebut terlihat dari tanggung jawab bendahara dalam mengelola uang persediaan, melakukan pencatatan transaksi keuangan, serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran.

Dalam pelaksanaannya, bendahara pengeluaran melakukan proses pengelolaan keuangan yang dimulai dari pengajuan kebutuhan anggaran oleh PPTK. Setelah itu dokumen pengajuan akan diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan sebelum mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran. Setelah proses tersebut selesai, bendahara pengeluaran melakukan pencairan dana serta melakukan pencatatan transaksi sebagai bagian dari administrasi keuangan.

Peran bendahara pengeluaran dalam proses tersebut sangat penting karena setiap transaksi keuangan harus didukung oleh dokumen yang lengkap dan dicatat secara sistematis. Hal ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2018) yang menyatakan bahwa tertib administrasi keuangan merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan sektor publik untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.

Selain itu, tugas bendahara pengeluaran juga telah diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa bendahara memiliki tugas melakukan penatausahaan keuangan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pembayaran, penatausahaan, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban. Dengan demikian bendahara pengeluaran memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputro et al. (2025) yang menyatakan bahwa bendahara pengeluaran memiliki peran penting dalam proses pencairan anggaran, pencatatan transaksi, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah.

b. Proses Administrasi Keuangan oleh Bendahara Pengeluaran

Berdasarkan hasil penelitian, proses administrasi keuangan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran di Inspektorat Daerah Kota Magelang meliputi beberapa tahapan yaitu pengelolaan uang persediaan, pencatatan transaksi keuangan, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Pengelolaan uang persediaan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional kegiatan yang bersifat rutin. Dalam proses ini bendahara pengeluaran bertugas melakukan pembayaran atas kegiatan yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang. Setiap transaksi yang terjadi kemudian dicatat dan dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti kuitansi, faktur, serta dokumen administrasi lainnya.



Pencatatan transaksi keuangan merupakan bagian penting dalam administrasi keuangan karena berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Menurut Halim (2014) administrasi keuangan yang tertib dapat mendukung pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien serta meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.

Selain itu, bendahara pengeluaran juga memiliki tanggung jawab dalam menyusun laporan pertanggungjawaban atau SPJ atas penggunaan anggaran. Laporan tersebut disusun berdasarkan dokumen pendukung yang telah dikumpulkan sebelumnya sehingga penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Hal ini juga didukung oleh penelitian Damayanti dan Priono (2023) yang menyatakan bahwa penatausahaan pengeluaran kas merupakan bagian penting dari pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk memastikan setiap transaksi dicatat secara administrasi dengan baik.

c. Kendala dalam Pelaksanaan Administrasi Keuangan

Dalam pelaksanaan tugasnya bendahara pengeluaran juga menghadapi beberapa kendala yang dapat mempengaruhi kelancaran administrasi keuangan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, salah satu kendala yang sering terjadi dalam proses administrasi keuangan adalah sistem aplikasi keuangan yang digunakan terkadang mengalami maintenance. Kondisi tersebut menyebabkan proses penginputan data dan pengolahan administrasi keuangan tidak dapat dilakukan untuk sementara waktu sehingga bendahara harus menunggu hingga sistem kembali dapat digunakan. Hal ini dapat menghambat kelancaran proses administrasi keuangan serta mempengaruhi ketepatan waktu dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Kondisi tersebut dapat menyebabkan proses penyusunan laporan pertanggungjawaban menjadi terhambat sehingga mempengaruhi ketertiban administrasi keuangan. Selain itu keterbatasan waktu dalam penyusunan laporan juga menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh bendahara pengeluaran.

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2019) salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan sektor publik adalah keterlambatan penyampaian dokumen administrasi yang dapat mempengaruhi proses pelaporan keuangan. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik antara bendahara pengeluaran dengan pihak terkait agar proses administrasi keuangan dapat berjalan dengan tertib.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Najoran et al. (2025) yang menyatakan bahwa bendahara pengeluaran memiliki peran strategis dalam memastikan akuntabilitas serta ketertiban administrasi keuangan daerah, namun dalam pelaksanaannya masih sering menghadapi kendala terkait kelengkapan dokumen administrasi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bendahara pengeluaran memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung tertib administrasi keuangan pada Inspektorat Daerah Kota Magelang. Peran tersebut terlihat dari tanggung jawab bendahara dalam mengelola uang persediaan, melakukan pencatatan transaksi keuangan, serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran. Melalui proses administrasi yang dilakukan secara sistematis dan didukung oleh kelengkapan dokumen, bendahara pengeluaran berkontribusi dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.



Selain itu, bendahara pengeluaran juga berperan dalam memastikan bahwa setiap transaksi keuangan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta didukung oleh dokumen yang lengkap. Hal ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan tertib administrasi keuangan pada instansi pemerintah daerah.

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yaitu sistem aplikasi keuangan yang terkadang mengalami maintenance sehingga dapat menghambat proses penginputan data serta penyusunan laporan administrasi keuangan.\

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan agar Inspektorat Daerah Kota Magelang dapat meningkatkan optimalisasi penggunaan sistem aplikasi keuangan agar proses administrasi keuangan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Selain itu, perlu adanya pengelolaan waktu kerja yang baik oleh bendahara pengeluaran dalam menyesuaikan proses penginputan data dengan kondisi sistem aplikasi, terutama ketika terjadi maintenance.

Dengan adanya pengelolaan sistem dan koordinasi yang baik, diharapkan proses administrasi keuangan dapat berjalan secara lebih tertib serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Damayanti, R., & Priono, H. (2023). Penatausahaan pengeluaran kas dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Najoan, J., et al. (2025). Peran bendahara pengeluaran dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Saputro, A., et al. (2025). Pengelolaan administrasi keuangan pada instansi pemerintah daerah. *Jurnal Keuangan Publik*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.